

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu Negara yang menganut sistem demokrasi sehingga publik dapat menyampaikan aspirasinya terhadap berbagai instansi tanpa terbentur hukum baik instansi swasta maupun pemerintah, satu diantaranya berupa instansi polisi republik Indonesia yang bertugas menengahi berbagai persoalan masyarakat yang terjadi. Adapun tugas pokok polisi Indonesia diantaranya berupa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polisi Republik Indonesia (POLRI) dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara, Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah.

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

Adanya isu negatif yang terjadi di dalam masyarakat berpengaruh terhadap citra Polres Bangkalan, seperti isu negatif tentang pelayanan pembuatan Surat Ijin Mengemudi Masyarakat mengeluhkan proses yang seolah-olah dipersulit dan menduga harus menyimpang administrasi agar dipermudah untuk mendapatkan pelayanan yang berada di POLRES Bangkalan seperti yang dialami salah satu masyarakat yang berinisial M mengemukakan bahwa dirinya merasa dipersulit dalam permohonan pembuatan surat ijin mengemudi (SIM). M mengatakan bahwa dirinya harus melakukan tes praktek berulang kali dalam hari yang berbeda namun tak kunjung lulus dan mendapatkan SIM. Dalam kasus tersebut, pihak kepolisian khususnya bagian humas memiliki peran penting dalam mengupayakan sebuah program kerja dan strategi agar lebih optimal guna menembuskan citra baik kepolisian kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga mengikis persepsi buruk masyarakat terlebih menghilangkan sebuah paham masyarakat yang beranggapan harus menyimpang adminidstrasi agar mendapatkan pelayan tersebut. Berdasarkan paparan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Humas untuk Meningkatkan Citra Polres Bangkalan Dalam Pelayanan Pembuatan Surat Ijin Mengemudi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: **Bagaimana strategi Humas untuk meningkatkan citra Polres bangkalan dalam pelayanan pembuatan SIM?**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yaitu **mengetahui strategi Humas untuk meningkatkan citra Polres bangkalan dalam pelayanan pembuatan SIM.**

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Peneliti

- a. Menambah pengetahuan dalam bidang hubungan masyarakat
- b. Mengetahui persoalan masyarakat dalam pembuatan SIM yang harus taat administrasi.

1.4.2 Bagi Polres Bangkalan

- a. Membantu untuk penyampaian informasi kepada masyarakat guna melancarkan strategi humas dalam meningkatkan citra Polres bangkalan.
- b. Memberikan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan terhadap mengontrol isu negatif terhadap Polres bangkalan.

1.4.3 Bagi Masyarakat

- a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pembuatan SIM.
- b. Meningkatkan informasi yang dimiliki masyarakat bahwa harus taat administrasi dalam permohonan pembuatan SIM.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian terarah dan dapat mencapai sasaran, maka penelitian dibatasi pada permasalahan strategi Humas dalam meningkatkan citra Polres Bangkalan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Subjek penelitian terbatas pada bidang Humas Polisi Resot.
2. Tugas Humas terbatas pada pengelolaan informasi dan Strategi dalam meningkatkan Citra Polres Bangkalan.
3. Permasalahan yang diangkat terbatas pada pelayanan pembuatan SIM
4. Metode penelitian yang digunakan meliputi metode deskriptif kualitatif.
5. Penelitian dilakukan di Polisi Resot Bangkalan.